

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PORTOFOLIO

(Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur dan Melengkapi nilai Mata Kuliah
Akuntansi Sektor Publik)

Dosen pengampu :

Dr. Pujiati, S. Pd., M. Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 4

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Muhammad Jibril Ramadhan | 2313031045 |
| 2. Nela Amelia | 2313031050 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ANALISIS 2 JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal Internasional 1

Judul	:	Applied Public Sector Accounting For Broadband Infrastructure Development With Public Private Partnership Scheme: A Literature Review
Penulis	:	Evi Steelyana W.
Volume	:	8
No	:	1
Tahun Terbit	:	2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan tema utama literatur yang membahas implementasi skema *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pengembangan infrastruktur broadband selama dua dekade (2000-2020). Penelitian juga mengeksplorasi kontribusi tema-tema tersebut terhadap pengembangan infrastruktur dan memberikan arahan untuk penelitian di masa depan. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review* - SLR), penelitian ini mencakup artikel yang diterbitkan di jurnal internasional berkualitas tinggi (Scopus Q1-Q3) dan menganalisis data dengan perangkat lunak NVIVO untuk mengidentifikasi tren dan pola tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan (*policy strategy*) merupakan tema dominan dalam literatur PPP untuk infrastruktur broadband, dengan 60% artikel membahas pentingnya kerangka regulasi dan peran pemerintah dalam mendorong investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berperan sebagai katalisator dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil yang kurang menarik bagi sektor swasta. Selain itu, tema lain yang muncul meliputi implementasi PPP (15%), kerangka kerja PPP (20%), dan nilai uang (*value for money*, 5%). Sebagian besar penelitian dilakukan di Inggris (63,2%), diikuti oleh Swiss (21,1%) dan Amerika Serikat (10,5%), menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan model PPP untuk broadband.

Dalam hal metodologi, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (53,8%), diikuti oleh metode kuantitatif (38,5%) dan campuran (7,8%). Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi kasus nyata dan mengevaluasi kinerja proyek PPP dalam berbagai konteks. Jurnal ini juga mencatat bahwa publikasi yang ditinjau memiliki kualitas tinggi dengan 60% berada pada kategori Q1 Scopus. Analisis tren penelitian dengan NVIVO menunjukkan bahwa kata-kata seperti PPP, broadband, infrastructure, public, private, dan policy sering muncul, menekankan hubungan erat antara kebijakan publik, peran pemerintah, dan kontribusi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur broadband.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa infrastruktur broadband telah menjadi layanan publik fundamental di era digital, dan skema PPP terbukti efektif dalam mempercepat pengembangan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Strategi kebijakan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan sektor swasta, termasuk melalui regulasi yang mendukung dan mekanisme pembiayaan yang inovatif. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah memperhatikan aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam PPP untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan proyek. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi mendalam tentang peran akuntansi sektor publik dalam mendukung tata kelola PPP, khususnya dalam konteks pengembangan infrastruktur broadband di negara berkembang.

Sumber Rujukan:

Steelyana, E. (2021). Applied public sector accounting for broadband infrastructure development with public private partnership scheme: a literature review. *Journal of Applied Finance and Accounting*. 8(1): 26-36.

Jurnal Internasional 2

Judul	:	Planning, Implementation, and Control of Management Accounting in the Public Sector
Penulis	:	Eti Kusmiati, Marti Dewi Ungkari dan Acep Abdul Basit
Volume	:	143
Tahun Terbit	:	2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tiga dimensi utama, yakni perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam akuntansi manajemen sektor publik. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui dokumentasi, kuesioner, dan wawancara terhadap 65 responden dari beberapa instansi pemerintah, seperti BAPPEDA, BPKAD, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini juga menggunakan skala penilaian dan triangulasi untuk memastikan validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi perencanaan dalam penerapan akuntansi manajemen sektor publik di Garut termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor rata-rata kumulatif sebesar 85,08%. Perencanaan mencakup penetapan tujuan dasar, program dan kegiatan, serta anggaran yang telah memenuhi prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Dimensi implementasi juga mendapat kategori sangat baik dengan skor rata-rata 87,06%. Realisasi program, anggaran, dan pelaporan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku, termasuk penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi dan lengkap, meskipun masih ada kendala pada kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan beberapa keterlambatan dalam pelaporan.

Namun, dimensi pengendalian menunjukkan skor yang lebih rendah dibandingkan dua dimensi lainnya, yaitu sebesar 79,56%, yang dikategorikan baik. Pengendalian mencakup perbandingan antara rencana dan realisasi program, evaluasi anggaran, serta penilaian kinerja. Meskipun pengendalian telah berjalan efektif, mekanisme penghargaan dan sanksi belum sepenuhnya optimal, dan beberapa evaluasi kinerja masih memerlukan penyempurnaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya

pengendalian yang lebih terintegrasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas pengendalian di masa mendatang.

Kesimpulannya, penerapan akuntansi manajemen sektor publik di Pemerintah Kabupaten Garut dinilai sangat baik secara keseluruhan, dengan kekuatan pada dimensi perencanaan dan implementasi, sementara pengendalian masih memerlukan peningkatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih sistematis. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan pengendalian berbasis teknologi dan analisis kinerja untuk mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang lebih baik di sektor publik.

Sumber Rujukan:

Kusmiati, E., Ungkari, M. D., & Basit, A. A. (2020). Planning, Implementation, and Control of Management Accounting in the Public Sector. In 2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019) (pp. 208-213). *Atlantis Press*.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan Keuangan dan Kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan berbagai laporan pendukung lainnya. Realisasi pendapatan daerah mencapai sekian persen dari anggaran yang telah ditetapkan, sementara belanja daerah mencerminkan efisiensi pengelolaan dana publik. Namun, terdapat penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya peningkatan pengeluaran atau kendala dalam pengelolaan surplus anggaran. Selain itu, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menunjukkan pemanfaatan SAL untuk membiayai kebutuhan tahun anggaran berjalan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi neraca, terdapat peningkatan nilai aset pemerintah daerah yang didukung oleh pengelolaan investasi jangka panjang dan aset tetap, meskipun kewajiban juga mengalami peningkatan. Arus kas menunjukkan penurunan kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi, yang dapat menjadi indikasi perlunya optimalisasi pendapatan dan pengendalian biaya. Laporan perubahan ekuitas mengungkapkan adanya kenaikan ekuitas, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terkait efektivitas koreksi dan revaluasi aset tetap. Catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi tambahan untuk mendukung transparansi dan pemahaman pengguna terhadap laporan yang disajikan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Sumber:

https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/08/Laporan-Keuangan-2023-Lampungbaratkab.go_id_.pdf



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	2.766.774.873.857,60	2.611.345.909.921,04
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2.	58.722.209.492,05	(17.851.113.184,44)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	5.6.4.	0,00	153.491.968.983,00
6	Lain-lain	5.6.5.	28.372.500.999,68	19.788.108.138,00
7	EKUITAS AKHIR		2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
5	Subtotal (3+4)		30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	5.2.5.	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
1	ASET	5.3.1.		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85
4	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.	55.285.946,00	36.759.446,00
5	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.	41.882.856,00	32.894.406,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4.	0,00	757.985.400,01
7	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5.	2.501.714.574,80	2.514.816.022,48
8	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6.	112.945.547,00	43.393.785,00
9	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7.	58.541.978.212,00	16.889.268.081,00
10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8.	(13.464.942.016,30)	(3.286.394.628,18)
11	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9.	13.081.250,00	83.083.328,00
12	Persediaan	5.3.1.1.10.	13.775.722.508,25	10.819.935.104,05
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)		92.436.350.839,98	76.200.542.730,21
14	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
15	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	438.454.309,00	422.564.708,85
16	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	40.891.759.418,66	41.533.308.105,72
17	Jumlah Investasi Jangka Panjang (15 s.d. 16)		41.330.213.725,66	41.955.870.814,57
18	ASET TETAP	5.3.1.3.		
19	Tanah	5.3.1.3.1.	652.395.963.680,00	653.643.184.930,00
20	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	479.161.840.538,69	459.892.185.851,69
21	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	934.369.585.791,34	905.618.832.827,34
22	Jalan, Jembatan dan Irigasi	5.3.1.3.4.	2.064.141.579.802,07	1.981.673.833.979,07
23	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	70.217.802.881,39	64.487.079.796,39
24	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	1.767.455.818,00	1.725.150.408,00
25	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.642.130.036.933,04)	(1.526.267.811.742,86)
26	Nilai Buku Aset Tetap (19 s.d. 25)		2.558.944.191.578,45	2.540.752.455.849,63
27	DANA CADANGAN	5.3.1.4.		
28	Dana Cadangan	5.3.1.4.1.	0,00	0,00
29	Jumlah Dana Cadangan (28)		0,00	0,00
30	ASET LAINNYA	5.3.1.5.		
31	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1.	3.508.157.926,39	0,00
32	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2.	3.667.996.371,00	3.465.815.871,00
33	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.	217.471.012.300,00	181.002.788.163,00
34	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4.	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)
35	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.5.	3.662.967.000,00	2.363.635.599,00
36	Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35)		225.439.714.824,39	184.239.405.289,00
37	JUMLAH ASET (13+17+26+29+36)		2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41
38	KEWAJIBAN	5.3.2.		
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.	172.538.202,15	129.102.406,81
41	Utang Bunga	5.3.2.1.2.	48.299.557,00	0,00
42	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3.	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00
43	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4.	3.420.600.694,00	2.513.371.173,00
44	Utang Beban	5.3.2.1.5.	7.983.610.755,00	3.551.848.971,00
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6.	383.741.686,00	0,00
46	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s.d. 45)		29.937.934.224,15	24.112.385.890,81
47	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.		
48	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.1.	34.342.951.595,00	52.261.014.935,00
49	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (48)		34.342.951.595,00	52.261.014.935,00
50	JUMLAH KEWAJIBAN (46 + 49)		64.280.885.819,15	76.373.400.825,81

Hal. 3

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
51	EKUITAS	5.3.3.		
52	EKUITAS	5.3.3.1.		
53	Ekuitas	5.3.3.1.1.	2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60
54	JUMLAH EKUITAS (53)		2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60
55	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (50 + 54)		2.918.150.470.168,48	2.843.148.274.683,41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

P. BUPATI LAMPUNG BARAT,


NUKMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1.	14.854.325.262,00	14.390.450.282,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2.	2.305.628.800,00	2.237.859.702,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3.	5.653.827.320,95	5.569.077.716,21
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4.	45.734.180.783,89	47.295.388.541,57
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5.	855.646.664.112,00	870.256.487.463,00
8	Penerimaan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6.	61.441.013.898,00	70.985.312.496,00
9	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.7.	0,00	12.722.026.000,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 9)		985.635.640.176,84	1.023.456.602.201,28
11	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
12	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1.	413.304.423.702,00	395.256.776.924,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2.	243.673.449.949,80	293.591.618.382,05
14	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3.	3.555.499.062,00	4.469.946.021,00
15	Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.4.	0,00	522.500.000,00
16	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.5.	32.310.714.788,00	19.513.941.922,00
17	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.6.	244.550.000,00	1.926.261.500,00
18	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.7.	1.634.829.400,00	1.475.794.900,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8.	171.170.180.000,00	170.854.037.000,00
20	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.9.	1.508.132.360,00	2.417.830.965,00
21	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 20)		867.401.779.261,80	890.028.707.614,05
22	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10 - 21)		118.233.860.915,04	133.427.894.587,23
23	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.		
24	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
25	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1.	200.563.588,00	538.773.904,00
26	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.2.	0,00	283.792.487,00
27	Jumlah Arus Masuk Kas (25 s.d. 26)		200.563.588,00	822.566.391,00
28	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.1.	23.471.410.062,00	37.544.778.356,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.2.	20.128.517.180,00	41.842.220.791,00
31	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2.3.	67.418.166.745,00	107.650.228.900,00
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.4.	5.836.651.645,00	3.821.418.300,00
33	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.5.	152.680.500,00	702.641.575,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6.	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
35	Jumlah Arus Keluar Kas (29 s.d. 34)		118.007.426.132,00	193.561.287.922,00
36	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (27 - 35)		(117.806.862.544,00)	(192.738.721.531,00)

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.		
38	Arus Masuk Kas	5.5.3.1.		
39	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.1	0,00	57.991.820.750,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas (39)		0,00	57.991.820.750,00
41	Arus Keluar Kas	5.5.3.2.		
42	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.1.	17.918.125.240,00	7.466.009.725,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas (42)		17.918.125.240,00	7.466.009.725,00
44	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (40 - 43)		(17.918.125.240,00)	50.525.811.025,00
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
46	Arus Masuk Kas	5.5.4.1.		
47	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1.	52.760.557.226,15	64.168.462.070,48
48	Jumlah Arus Masuk Kas (47)		52.760.557.226,15	64.168.462.070,48
49	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
50	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1.	52.717.121.430,81	64.399.520.985,66
51	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.2.2.	0,00	668.075,85
52	Pengeluaran Dana BOS Alimasi dan BOS Kinerja	5.5.4.2.3.	0,00	21.400.000,00
53	Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja tahun 2022	5.5.4.2.4.	428.750,00	0,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s.d. 53)		52.717.550.180,81	64.421.589.061,51
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (48 - 54)		43.007.045,34	(253.126.991,03)
56	Kenalkan/Penurunan Kas (22 + 36 + 44 + 55)		(17.448.119.823,62)	(9.038.142.909,80)
57	Saldo Awal Kas		48.306.801.785,85	57.344.944.695,65
58	Saldo Akhir Kas (56 + 57)	5.5.5.	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85
59	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		25.819.052.572,19	44.640.582.801,71
60	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	61.075,00
61	Saldo Akhir Kas di BLUD		4.597.603.900,41	3.452.121.126,70
62	Saldo Akhir Kas Dana BOS		281.132.047,63	214.036.782,44
63	Saldo Akhir Kas Lainnya		15.842.200,00	0,00
64	Kas Dana BOK Puskesmas		145.051.242,00	0,00
65	Saldo Akhir Kas (59 s.d. 64)		30.858.681.962,23	48.306.801.785,85

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PA SURABAYA LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1.		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1.		
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	14.870.851.762,00	14.411.751.310,00
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2.	2.356.222.250,00	2.286.335.782,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3.	4.895.841.920,94	5.379.691.717,82
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	48.965.554.967,60	38.248.628.564,05
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO (3 s.d. 6)		71.088.470.900,54	60.328.407.374,37
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2.		
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1.	739.244.658.525,00	756.236.340.039,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2.	103.093.724.029,00	71.771.371.868,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer - LO (9 s.d. 10)		842.338.382.554,00	830.009.711.907,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3.		
13	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1.	23.053.728.222,00	16.914.529.726,00
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13)		23.053.728.222,00	16.914.529.726,00
15	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO (7+11+14)		936.480.581.676,54	907.252.649.007,37
16	BEBAN DAERAH	5.4.2.		
17	BEBAN OPERASI	5.4.2.1.		
18	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	414.097.472.312,00	394.475.604.682,00
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2.	245.179.858.903,10	288.628.568.302,10
20	Beban Bunga	5.4.2.1.3.	3.604.736.719,00	4.319.006.596,00
21	Beban Subsidi	5.4.2.1.4.	0,00	522.500.000,00
22	Beban Hibah	5.4.2.1.5.	32.310.714.788,00	22.567.856.176,00
23	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6.	244.550.000,00	2.016.261.500,00
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7.	10.408.433.265,21	2.944.437.959,00
25	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8.	111.250.768.130,18	149.529.517.264,71
26	Jumlah Beban Operasi (18 s.d. 25)		817.096.534.117,49	865.003.752.479,81
27	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2.		
28	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1.	1.715.995.373,00	1.645.398.027,00
29	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2.	53.821.021.000,00	53.370.540.000,00
30	Jumlah Beban Transfer (28 s.d. 29)		55.537.016.373,00	55.015.938.027,00
31	JUMLAH BEBAN (26 + 30)		872.633.550.490,49	920.019.690.506,81
32	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI (15-31)		63.847.031.186,05	(12.767.041.499,44)
33	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.		
34	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.1.		
35	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1.1.	160.196.170,00	286.438.221,00
36	Jumlah Surplus Non Operasional - LO (35)		160.196.170,00	286.438.221,00
37	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.2.		
38	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.2.1.	173.441.327,00	824.764.484,00
39	Jumlah Defisit Non Operasional - LO (38)		173.441.327,00	824.764.484,00
40	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (36 - 39)		(13.245.157,00)	(538.326.263,00)
41	SURPLUS/DEFISIT - LO SEBELUM POS LUAR BIASA (32+40)		63.833.786.029,05	(13.305.367.762,44)
42	POS LUAR BIASA	5.4.4.		
43	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.4.4.1.		
44	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1.1.	0,00	0,00
45	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO (44)		0,00	0,00
46	BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2.		
47	Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1.	5.111.576.537,00	4.545.745.422,00
48	Jumlah Beban Luar Biasa - LO (47)		5.111.576.537,00	4.545.745.422,00
49	JUMLAH POS LUAR BIASA (45 - 48)		(5.111.576.537,00)	(4.545.745.422,00)
50	SURPLUS/DEFISIT-LO (41 + 49)		58.722.209.492,05	(17.851.113.184,44)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	U R A I A N	Catatan	2023 (Audited)			2022 (Audited)
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12	14.390.450.282,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92	2.237.859.702,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	100,00	5.569.077.716,21
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56	48.117.954.932,57
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s.d. 6)		65.358.127.413,00	68.748.525.754,84	105,19	70.315.342.633,28
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	850.778.668.525,00	855.646.664.112,00	100,57	870.256.467.463,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	72.781.912.342,00	61.441.013.898,00	84,42	70.985.312.496,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 10)		923.560.580.767,00	917.087.678.010,00	99,30	941.241.799.959,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
13	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (13)		0,00	0,00	0,00	12.722.026.000,00
15	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 14)		988.918.798.180,00	985.836.203.764,84	99,69	1.024.279.168.592,28
16	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
17	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
18	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53	395.256.776.924,00
19	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	254.637.081.677,00	243.673.449.948,80	95,69	293.591.618.382,05
20	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55	4.469.946.021,00
21	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	0,00	0,00	0,00	522.500.000,00
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.5.	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11	19.513.941.922,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6.	292.000.000,00	244.550.000,00	83,75	1.926.261.500,00
24	Jumlah Belanja Operasi (18 s.d. 23)		723.908.191.305,00	693.888.637.501,80	95,74	715.281.844.749,05
25	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1.	23.927.841.926,00	23.471.410.082,00	98,09	37.544.778.356,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2.	20.483.790.975,00	20.128.517.180,00	98,27	41.842.220.791,00
28	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.3.	67.738.072.944,00	67.418.166.745,00	99,53	107.650.228.900,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4.	5.995.096.510,00	5.836.651.645,00	97,36	3.821.418.300,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.5.	155.000.000,00	152.680.500,00	98,50	702.641.575,00
31	Jumlah Belanja Modal (26 s.d. 30)		118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91	191.561.287.922,00
32	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
33	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1.	1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	2.417.830.965,00
34	Jumlah Belanja Tidak Terduga (33)		1.613.141.895,00	1.508.132.360,00	93,49	2.417.830.965,00
35	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
36	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	2.183.360.200,00	1.634.829.400,00	74,88	1.475.794.900,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	171.170.180.000,00	171.170.180.000,00	100,00	170.854.037.000,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d. 37)		173.353.540.200,00	172.805.009.400,00	99,68	172.329.831.900,00
39	JUMLAH BELANJA DAERAH (24+31+34+38)		1.017.174.385.750,00	984.409.205.393,80	96,78	1.081.589.995.536,95
40	SURPLUS / (DEFISIT) (15 - 39)	5.1.3	(28.255.677.570,00)	1.426.988.371,04	(5,05)	(57.310.826.943,77)
41	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1.	48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	56.959.356.108,81
44	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2.	0,00	0,00	0,00	57.991.820.750,00
45	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (43 s.d. 44)		48.174.340.190,00	48.174.340.190,04	100,00	114.951.176.858,81
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.				
47	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1.	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2.	17.918.662.620,00	17.918.125.240,00	100,00	7.466.009.725,00
49	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (47 s.d. 48)		19.918.662.620,00	18.918.125.240,00	94,98	9.466.009.725,00
50	PEMBIAYAAN NETO (45 - 49)		28.255.677.570,00	29.256.214.950,04	103,54	105.485.167.133,81
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (40 + 50)	5.1.5	0,00	30.683.213.321,08	0,00	48.174.340.190,04

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

P. BUPATI LAMPUNG BARAT.


NUKMAN

ANALISIS 3 JURNAL NASIONAL

1. A. IDENTITAS JURNAL

Judul Jurnal : Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi

Tahun Terbit 2018

Nama Penulis : Elvira Zeyn

Tanggal di Akses : 21 November, 2024

B. DESKRIPSI JURNAL

Terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002;

Darma, 2004). Selanjutnya hasil penelitian Herlin (2010) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi melalui akuntabilitas publik. Sedangkan dari penelitian lainnya menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah (Bambang, 2006). Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup (sedang). Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik.

Sumber:

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-36.

2. A. IDENTITAS JURNAL

Judul : Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penulis : Bambang Pamungkas

Tahun terbit 2012

Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Ranggagading

Sumber Rujukan : (Pamungkas, 2012)

Tanggal akses : 18 November 2024

B. DESKRIPSI JURNAL

Dalam penelitian dapat dikutip bahwa, langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim pemerintahan yang baik (good governance), yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ada tiga pilar yang dimaksud yaitu: (1) Transparansi; (2) Partisipasi; dan (3) Akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Instrumen penelitian yang digunakan dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan pengujian baik mengenai validitasnya (validity), maupun keterandalannya (reliability). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 0.214, dengan sig t kurang dari 5%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas peraturan perundangan terhadap laporan keuangan pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa pada sektor pemerintah, lingkungan hukum memang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Suatu laporan keuangan akan berkualitas bilamana, laporan keuangan tersebut dapat diaudit dan hasil auditnya menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat dan telah diaudit akan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain kondisi yang berkaitan dengan masalah akuntansi, laporan keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintah pada dasarnya merupakan kumpulan dari laporan kegiatan proyek ataupun laporan kegiatan rutin, sehingga pemeriksaan yang selama ini dilakukan adalah lebih banyak kepada pemeriksaan ketaatan dan bersifat parsial. Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

Sumber:

Pamungkas, B. (2012). Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Rangagading*, 12(1), 001-010.

3. B. IDENTITAS JURNAL

Judul Jurnal : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Tahun Terbit 2008

Nama Penulis : Purwaniati Nugraheni Imam Subaweh

Tanggal di Akses : 18 November 2024

Jurnal(Vol&Halaman): Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol.13 Hal.48-58)

B. DESKRIPSI JURNAL

Prinsip pengelolaan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus berlaku diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pengelolaan yang baik perlu penguatan sistem dan lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut, sesuai dengan amanat pasal 23 C UUD 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain itu ditetapkan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan dan struktur laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, dan peningkatan kualitas laporan keuangan Itjen Depdiknas Tahun 2007 dan 2008 dibandingkan dengan laporan

keuangan Tahun 2006. Pengaruh Pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAPPB terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan telah mengalami peningkatan setelah penerapan SAP, namun peningkatan tersebut belum optimal karena belum didukung oleh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB yang memadai. Hal ini terlihat dari jumlah personil yang menangani laporan keuangan belum memenuhi kebutuhan, kemampuan personil belum sesuai dengan kebutuhan, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para personil tersebut belum memadai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan SAP. Peningkatan kualitas personil telah dilaksanakan antara lain dengan mengikut sertakan pengelola laporan keuangan dalam sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan mengenai SAP dan aplikasinya sesuai dengan proporsidan tanggung jawabnya.

Sumber:

Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1).

ANALISIS 3 ARTIKEL BERITA

Artikel 1

Persepsi Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Pemerintah

Artikel ini membahas perbedaan persepsi antara akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Selama ini, akuntansi pemerintahan sering dipandang sebagai pengganti akuntansi sektor publik, padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Akuntansi sektor publik mencakup organisasi non-profit, yayasan, partai politik, tempat ibadah, hingga sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, akuntansi pemerintahan lebih terbatas pada pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun RAPBN/RAPBD. Perbedaan ini penting karena mencerminkan kebutuhan pengelolaan yang lebih luas pada sektor publik di luar lingkup pemerintahan.

Dalam praktiknya, peran sektor publik di Indonesia sangat signifikan sebagai tulang punggung perekonomian, berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang lebih menitikberatkan peran sektor swasta. Artikel ini juga mengkritik sistem pendidikan akuntansi di Indonesia yang lebih berorientasi pada sistem AS, sehingga pembahasan akuntansi sektor publik sering kali tereduksi menjadi akuntansi pemerintahan saja. Hal ini berdampak pada kurangnya pengaturan dan pengajaran teknik akuntansi yang relevan untuk organisasi sektor publik yang lebih kompleks di luar pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan dalam sistem pendidikan dan praktik akuntansi sektor publik menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, artikel ini menyoroti perkembangan akuntansi sektor publik di negara lain seperti Inggris, yang telah menerapkan standar dan praktik yang lebih maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sektor publik. Misalnya, Inggris telah memprioritaskan pengukuran kinerja berbasis hasil dan efisiensi anggaran sejak 1960-an. Sementara itu, di Indonesia, implementasi reformasi akuntansi sektor publik baru dimulai pada era reformasi, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan korupsi. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi banyak

tantangan, seperti dominasi pengaruh politik dan lemahnya manajemen keuangan publik.

Kesimpulannya, akuntansi sektor publik memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Pengembangan disiplin ini harus mencakup teknik-teknik akuntansi yang relevan, standar pelaporan yang konsisten, serta fokus pada efisiensi dan efektivitas. Reformasi dalam pendidikan dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia perlu terus dilakukan agar dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang baik dan transparan, sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi.

Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/71982-ID-pengaruh-penerapan:akuntansi-sektorpubl.pdf>

Artikel 2

Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia

Artikel ini membahas perlakuan akuntansi sektor publik di desa-desa Indonesia dengan fokus pada kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan analisis keuangan desa. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, setiap desa di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi entitas mandiri dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun, desa-desa masih menghadapi banyak tantangan, seperti kompleksitas aturan, keterbatasan pengalaman aparatur desa, dan rendahnya pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual.

Salah satu masalah utama adalah ketergantungan desa pada transfer pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali tidak diiringi dengan peningkatan belanja modal yang produktif. Analisis pada APB Desa menunjukkan adanya disparitas dalam pengelolaan keuangan di antara desa-desa. Desa yang lebih inovatif seperti Desa A, misalnya, mampu meningkatkan belanja modal hingga 62,33%, sementara desa lain hanya mengalokasikan 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya investasi dana cadangan dan pengelolaan kas yang lebih produktif. Desa dapat memanfaatkan dana yang menganggur untuk investasi seperti deposito, obligasi, atau bahkan saham guna meningkatkan pendapatan. Namun, rendahnya keberanian aparatur desa dalam mengambil risiko investasi mencerminkan kurangnya jiwa kewirausahaan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Kesimpulannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi keuangan desa, diperlukan regulasi teknis yang terpadu, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan budaya kompetitif antar desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong desa menjadi entitas yang mandiri dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan transparan.

Sumber: <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/681/601>

Artikel 3

Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa

Artikel ini menganalisis implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan pemerintahan Desa Gendingan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi prosedur pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan di Desa Gendingan telah sesuai dengan peraturan, dan sistem informasi berbasis desa seperti SISKEUDES membantu memperbaiki kualitas penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan akuntansi sektor publik yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan APBDes di Desa Gendingan dimulai dengan perencanaan melalui RKPDesa, yang melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Proses ini dilanjutkan dengan penyusunan peraturan desa yang melibatkan sekretaris desa, kepala desa, dan BPD hingga mendapatkan evaluasi dari bupati. Prosedur ini telah memenuhi ketentuan regulasi dan menghasilkan alokasi anggaran yang

proporsional, yaitu 70% untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, serta 30% untuk tunjangan aparatur desa.

Dalam penyajian laporan keuangan, Desa Gendingan telah menggunakan metode berbasis akrual yang memungkinkan transparansi lebih baik. Laporan Realisasi Anggaran disusun setahun sekali dan mencakup elemen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan standar akuntansi pemerintah dan menjadi indikator komitmen desa dalam pengelolaan dana yang efektif. SISKEUDES turut mendukung pelaporan yang lebih terorganisir, menggantikan metode manual yang cenderung rentan terhadap kesalahan.

Kesimpulannya, implementasi akuntansi sektor publik di Desa Gendingan sudah berjalan baik dengan dukungan sistem dan regulasi yang memadai. Pemerintah desa telah berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kemakmuran masyarakatnya. Namun, saran diberikan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tahapan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBDes.

Sumber: <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/download/481/390/>